

PERAN DPRD DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

kumoro@map.ugm.ac.id

HP: 081 328 488 444



Tujuan Pembangunan Daerah

1. Mengurangi disparitas/ketimpangan pembangunan antar-daerah, antar-strata masyarakat
2. Memberdayakan masyarakat & memberantas kemiskinan
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Meningkatkan pendapatan & kesejahteraan rakyat
5. Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PERGESERAN POLITIK PENGANGGARAN DAERAH

- Peran bujeter DPRD sedang mencari bentuk (dari “self-financing” ke “external control”?)
- PDRB per kapita meningkat, tetapi *horizontal imbalance* juga bertambah parah (DAU lebih bernuansa politis)
- Peningkatan *tax effort* diantara Pemda Kabupaten/Kota (Masalah: bagaimana daerah memahami kaitannya dengan investasi)
- Tabungan daerah meningkat (Lewis, 2004). APBN defisit (Rp 61,9 T) tetapi APBD surplus (Rp 43 T), belanja kurang efektif (Depkeu, 2009)
- Pada tingkat lokal, pemahaman mengenai kaitan antara anggaran dan pelayanan dasar masih sangat rendah.

APBD Kab Musi Banyuasin 2009 (Rp juta)

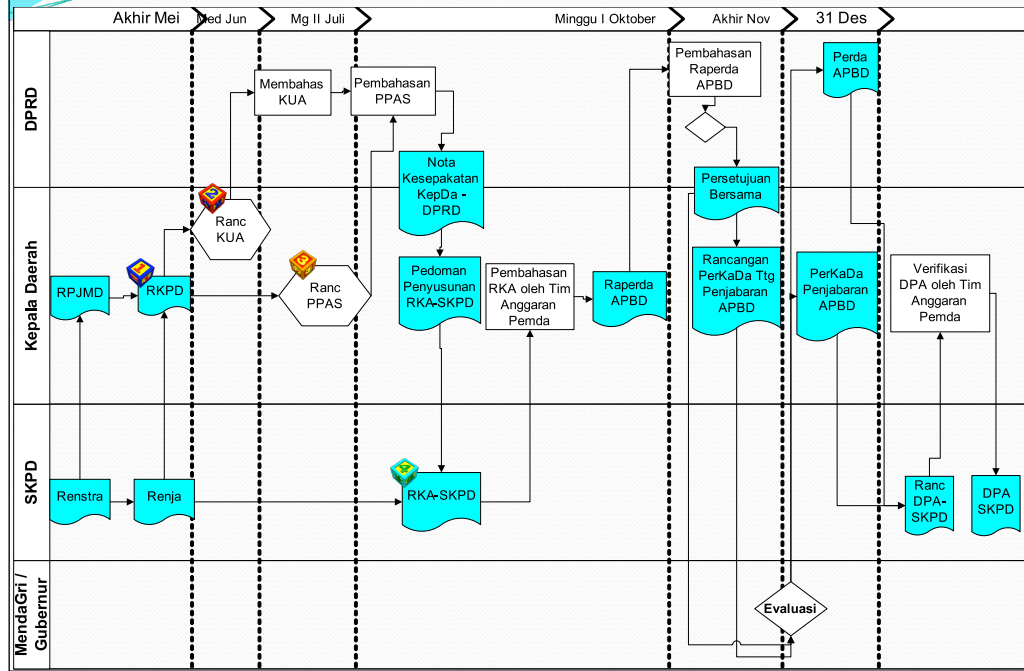
Uraian	Anggaran	% dari Belanja
PENDAPATAN	1.197.639	98.56
Pendapatan Asli Daerah	32.570	2.68
Hasil Pajak Daerah	3.793	0.07
Hasil Retribusi Daerah	1.859	0.02
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.150	0.06
Lain-lain PAD yang Sah	23.768	1.82
Dana Perimbangan	1.104.943	90.92
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	977.031	80.40
Dana Alokasi Umum	86.728	7.13
Dana Alokasi Khusus	41.184	3.23
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	60.127	5.78
BELANJA	1.215.189	100,00
Belanja Tidak Langsung	422.439	34.76
Belanja Pegawai	336.925	27.73
Bantuan Sosial	27.587	2.27
Bantuan Pemerintahan Desa	20.670	201
Belanja Tidak Terduga	2.909	0.01
Belanja Langsung	792.759	65.24
Belanja Pegawai	79.752	6.56
Belanja Barang dan Jasa	218.252	17.96
Belanja Modal	494.747	40.71

Analisis Kepentingan Stakeholders

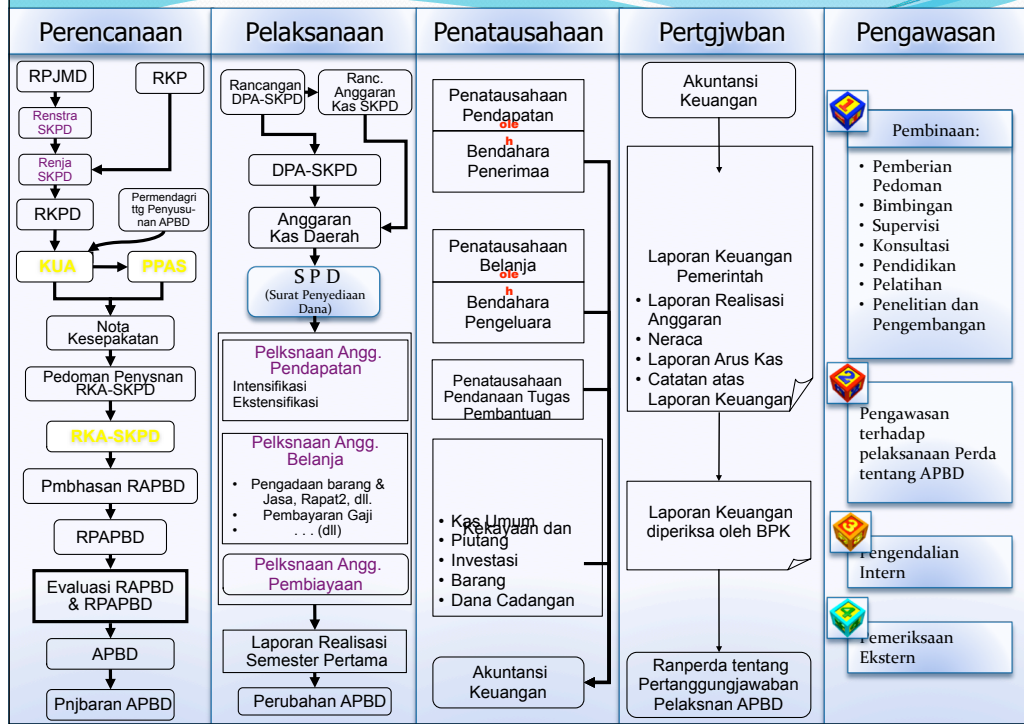
- **KEPALA DAERAH**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ visi KDH terwujud)
- **DPRD**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD)
- **TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD**
Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E)
- **SKPD**
Getting money first
- **PIMPINAN KEGIATAN**
Berhemat dan mampu meng-SPJ-kannya
- **MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI**
(Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lain-

Untuk mewujudkan kewajiban daerah, apakah kepentingan dapat diserasikan?

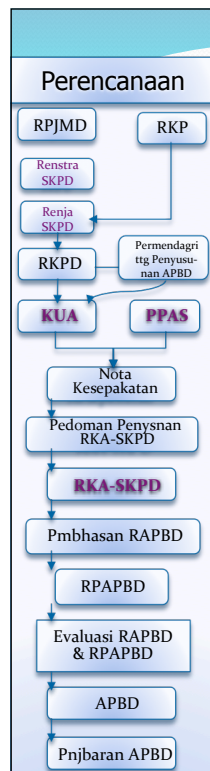
JADWAL PENYUSUNAN APBD



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

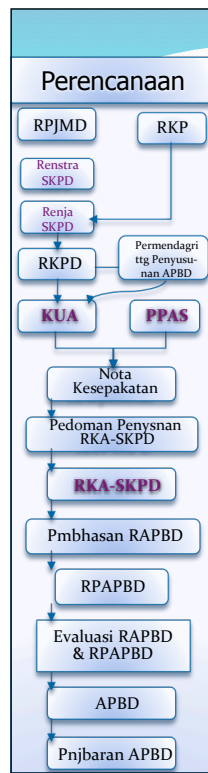


KEBIJAKAN UMUM APBD



- KUA memuat:
 - **target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program** yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah
 - **proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan**
 - **asumsi yang mendasarinya target dan proyeksi**
- Pembahasan KUA dilakukan oleh **TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD** dalam **pembicaraan pendahuluan RAPBD** tahun anggaran berikutnya.
- Disepakati dalam Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD Tahun XXXX antara:
 - Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah
 - Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil-Wakil Ketua)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA



- PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara :
 - **Rancangan program prioritas** dan **patokan batas maksimal anggaran** yang diberikan kepada SKPD
 - Acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- Disusun dengan tahapan sbb:
 - menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- Disepakati dalam sebuah Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Tahun XXXX antara:
 - Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah
 - Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil-Wakil Ketua) yang bertindak selaku dan atas nama DPRD

Catatan ttg APBD & Pembangunan Muba

1. Pengesahan jangan sampai terlambat: APBD TA 2009 disahkan tgl 24 Maret 2009; APBD TA 2010 disahkan 5 Des 2009
2. Ketergantungan penerimaan daerah kepada subsidi Pemerintah Pusat (PAD hanya 2.68% dari total Belanja).
3. Daya serap rendah; TA 2009, hingga November 2009 baru terserap 52 persen; SiLPA: Rp 25,5 M (2,06% dari rencana belanja)
4. Perlu perhatian lebih besar kepada pembiayaan infrastruktur (jalan, jembatan, telekomunikasi).
5. Kualitas SDM masih rendah (69,78% lulus SD, 19,03% SMP, 10,02% SMA, 1,17% PT).

Masalah Infrastruktur



Jalinteng Mura-Muba

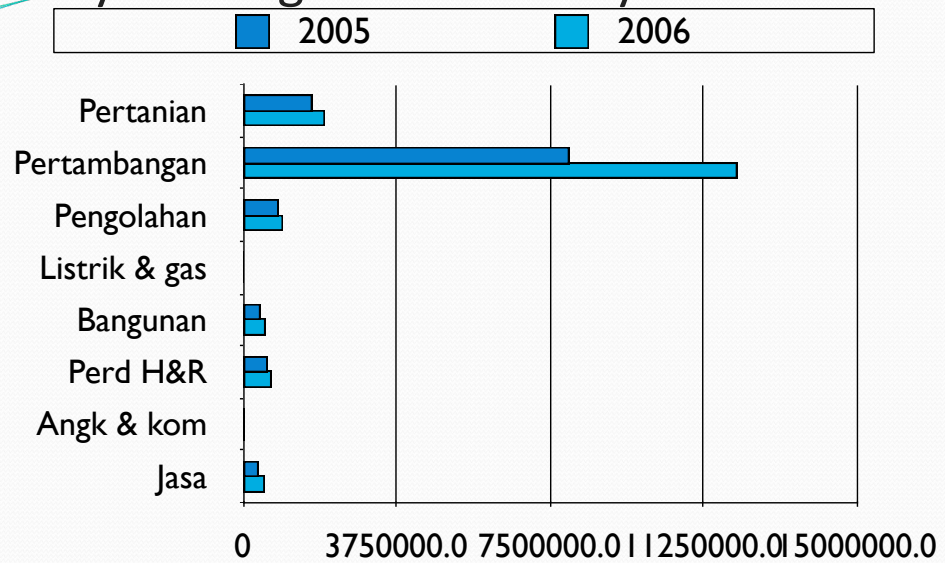


Penambahan STO



Konstruksi Jembatan₁₁

Penyumbang Ekonomi Rakyat Muba



Catatan: 71,1% (Rp 12,06 T) PDRB berasal dari pertambangan
Sumber: BPS, 2007

Modus Korupsi APBD

1. Penggelapan anggaran; mengambil pos anggaran lain dg maksud “menyembunyikan” pos yg mencolok & tidak rasional
2. Menciptakan anggaran baru yg tdk diatur PP 21/2007 ttg Kedudukan Keuangan DPRD
3. *Mark-up* (penggelembungan) anggaran
 - Alokasi anggaran kembar
 - Anggaran tanpa rincian
 - Menghilangkan pos anggaran
 - Pengambilalihan anggaran yg seharusnya diberikan dlm bentuk jaminan asuransi, diambil sbg uang *cash*.

Sumber: ICW, 2007

Kedudukan Keuangan DPRD

(PP No.21/2007)

- Penghasilan pimpinan & anggota: 10 jenis (uang representasi, t.keluarga, t.beras, u.paket, t.jabatan, t.Pamus, t.Komisi, t.Panggar, t.BK, t.alat kelengkapan lain). Di luar itu tidak ada tambahan.
- TKI (Tunj.Komunikasi Intensif) utk mendorong kinerja DPRD. Kinerja hendaknya dapat dipertanggungjawabkan.
- BPOP (Belanja Penunjang Operasional Pimpinan) utk kegiatan representasi, pelayanan & pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.
- LPJ atas dana TKI termasuk objek pemeriksaan BPK. Jika penggunaannya menyimpang, dapat dikenai unsur pidana korupsi.
- Masih ada ketidakjelasan aturan keuangan. Mis: BPOP tdk boleh untuk pembayaran tunj.representasi, tetapi BPOP yg masuk belanja penunjang kegiatan dapat digunakan untuk tunjangan representasi. Bagaimana pemecahannya?

Anggaran untuk DPRD

- Semua anggota: uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras (setara PNS)
- Ketua: setara gaji pokok Bupati
- Wakil: 80% dari uang representasi Ketua DPRD
- Anggota: 75%
- Tunj. jabatan: 145% dr masing-masing uang representasi
- Ps.5: rumah jabatan utk pimpinan DPRD & anggota DPRD atau tunjangan perumahan (jika rumah jabatan belum ada)
- Belanja penunjang keg: rapat, kunker, peny. Raperda, telaah Perda, peningkatan profesionalisme, koordinasi & konsultasi kegiatan pemerintahan & kemasyarakatan.
- ✎ Catatan: 33 unit Proton TA 2010 (@ Rp 150 jt) masuk yg mana?

Temuan BPK di Kab Muba 2005

1. Lumpsum anggota DPRD sebesar Rp 220 jt dibayarkan sebagai tambahan penghasilan
2. Biaya jasa konsultan Rp 249,5 jt tidak disertai bukti sah
3. Kemahalan kendaraan roda empat Rp 576,6 jt
4. Pemeliharaan kendaran Rp 90 jt dibayarkan sbg tambahan penghasilan
5. Penunjukan langsung e-Gov mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 744,3 jt
6. Biaya over-head di Dinas PU sebesar Rp 181,8 jt
7. Sarana olah-raga PON XVI membebani daerah sebesar Rp 30,51 M
8. Bantuan keuangan ke Parpol Rp 832,9 jt tidak didasari Peraturan Daerah.

Bantuan Keuangan ke Parpol

PP No.5/2009

- Diberikan kepada Parpol yg memperoleh kursi di DPRD
- Berdasarkan jumlah perolehan suara Pemilu, diberikan secara proporsional, dimasukkan ke rekening kas umum Parpol
- Penggunaan bantuan keuangan:
 1. Pendidikan politik; peningkatan kesadaran hak & kewajiban masy, partisipasi politik & inisiatif, kemandirian dan kedewasaan dlm membangun karakter bangsa
 2. Kegiatan operasional sekretariat; administrasi umum, peralatan kantor
- Parpol wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yg bersumber dana bantuan APBD.

PENUTUP

Fungsi pokok DPRD dalam penyusunan APBD adalah pada perencanaan, penentuan prioritas, dan pengawasan.

Bagaimana supaya anggaran bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan layanan publik? Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.

SEKIAN